

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin berkembang dengan pesat khususnya pada teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi sangat membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu yang paling berpengaruh paling besar dalam penggunaan sistem informasi adalah internet. Salah satu yang paling berpengaruh paling besar dalam penggunaan sistem informasi adalah internet. Pemanfaatan media internet sebagai fasilitas informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Dengan adanya internet masyarakat dapat terhubung dan berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih. Sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi. Hal ini sebagai akibat makin beragam dan kompleksnya aktivitas manusia diberbagai sektor kehidupan.

Instansi pemerintahan pun telah mengedepankan teknologi informasi khususnya internet sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan sumber daya manusia (SDM)

dalam mengembangkan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan publik (*Public Service*) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi pelayanan publik ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Menurut MenPan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik (*public service*) adalah “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”(Menpan, 2003).

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus mempunyai kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam membangun kinerja pelayanan publik yang professional. Pelayanan publik yang baik harus bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin serta mencakup semua bidang pelayanan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang lainnya. Pelayanan publik mempunyai asas-asas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban (Kepmenpan Nomor 63/KEP/M. PAN /7/2003).

Sehingga dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menerangkan dan mengembangkan pelayanan berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah sejak Tahun 2003 telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* (*E-Government Development Framework*) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-government. Agar kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung (Menteri Komunikasi dan Informasi, 2003).

*E-Government* merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain misalnya kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Tujuan *E-Government* adalah untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan. Implementasi *E-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud

keterbukaan (*transparancy*) dalam pelaksanaan pelayanan publik. (Rubiyanto:2018)

Pentingnya *E-Government* pada pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengembangkan aplikasi E-Planning atau E-Musrenbang dalam kerangka implementasi E-Government tersebut benar-benar sangat membantu dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya serta sasaran yang ingin dicapai yaitu tercapainya efisiensi dan efektifitas sistem serta proses perencanaan pembangunan daerah.

E-Musrenbang merupakan sistem informasi musyawarah berbasis website yang dikembangkan oleh BAPPENAS untuk mendukung upaya perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Electronic Musrenbang (E-Musrenbang) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi secara online (Dwi Karuniawati:2016).

E-Musrenbang pertama kali diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2014. Munculnya E-Musrenbang ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam

bentuk cetak (*hard copy*), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran Dengan dikembangkannya E-Musrenbang ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses perencanaan agar menjadi lebih baik dari yang dulu-dulu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

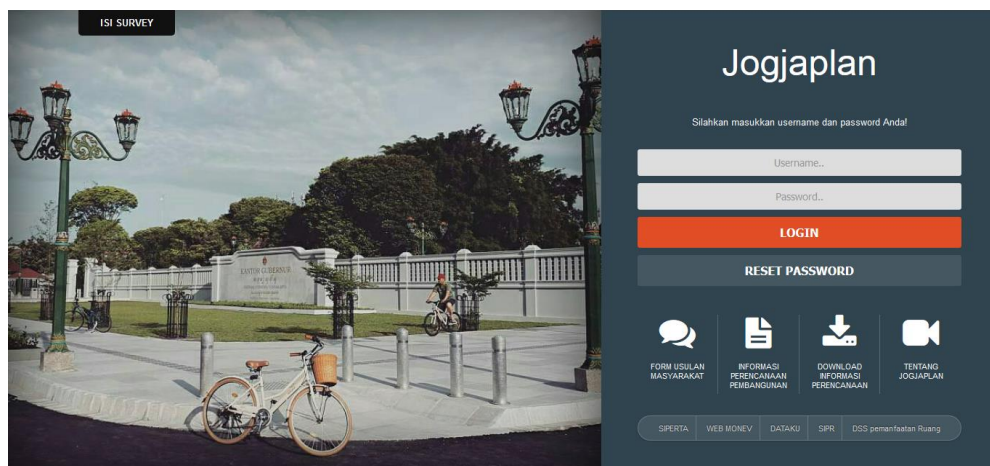
Perbedaan musrenbang sebelum menggunakan aplikasi dan setelah menggunakan aplikasi yaitu pada musrenbang sebelum menggunakan aplikasi dimulai dengan diselenggarakannya musrenbang kelurahan, lalu kelurahan mengirimkan usulan dengan format *excel*, kemudian penyandingan dengan prioritas daerah dan menyeragamkan format, musrenbang kecamatan diselenggarakan, lalu kecamatan mengirimkan berita acara musrenbang kecamatan sebagai bahan musrenbang kabupaten, kemudian penyandingan dengan prioritas daerah dan menyeragamkan format, musrenbang kabupaten diselenggarakan, lalu berita acara musrenbang kabupaten. Sedangkan musrenbang setelah menggunakan aplikasi dimulai pada Bappeda lalu penyusunan RPJMD dan penyusunan rancangan awal RKPD kemudian musrenbang kelurahan, lalu kelurahan mengisikan usulan kedalam aplikasi, musrenbang kecamatan, lalu kecamatan membuat berita acara musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, lalu kabupaten membuat berita acara musrenbang kabupaten.

E-Musrenbang di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah diterapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk E-Government. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah unsur perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Beratnya tupoksi yang diemban, membuat BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas. *Jogjaplan* adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. Dengan adanya *Jogjaplan* (E-Musrenbang), BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Gambar 1.1

### Aplikasi E-Musrenbang (*Jogjaplan*)



(sumber: <http://jogjaplan.com/2021/login>)

E-Munrenbang (*Jogjaplan*) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu proses berjalannya musrenbang di DIY, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintah khususnya pada perencanaan lebih terkontrol, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Dasar-dasar hukum E-Musrenbang, antara lain, yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008
- 5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menganalisa Bagaimana Implementasi dan Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Implementasi E-musrenbang. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Implementasi E-Musrenbang Tahun 2019 (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Yogyakarta)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi E-Musrenbang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi E-Musrenbang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi E-Musrenbang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi E-Musrenbang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik pada jurusan Ilmu Pemerintahan. Serta dapat menambah Pengetahuan tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) berbasis Elektronik yaitu E-Musrenbang di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana implementasi E-Musrenbang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi E-Musrenbang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.



## E. Tinjauan Pustaka

### *Literature Review*

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Analisis
1.	Ulfa	2019	Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo	Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun aplikasi e-musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, yang dikarenakan penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui program e-musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-musrenbang dan hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana implementasi e-musrenbang. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.

2.	Zulkarnain Ramdhan Hasan	2019	Implementasi Kebijakan E- Musrenbang Di Kota Bandung	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bappelitbang telah mengimplementasikan 4 indikator pada pelaksanaan E-Musrenbang di Kota Bandung. Implementasi indikator-indikator tersebut adalah (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi dan (4) (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian menunjukkan Bappelitbang telah mengimplementasi kebijakan E-Musrenbang dengan baik namun kedepannya diharapkan dapat ditingkatkan lagi terlebih pada proses Komunikasi dan Sumber Daya. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan e-musrenbang yang sudah berjalan. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
3.	Iman Ardhi Prabowo, Fajar Nugraha	2018	Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati	<p>Penelitian ini membahas tentang pembuatan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pati yang akan digunakan untuk pengelolaan perencanaan pembangunan oleh Bappeda dan pihak Satuan Kerja. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Prototype. Perancangan sistem informasi menggunakan <i>Data Flow Diagram</i> (DFD) yang digunakan untuk mendesaian sistem informasi</p>

				<p>musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten pada badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten Pati. Pada penelitian ini fokus penelitiannya berfokus pada pembuatan dan pengembangan sistem e-musrenbang. Dan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
4.	Rubiyanto	2018	Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	<p>Dalam penelitian ini diketahui Hasil penelitian Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, karena dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan diterapkannya sistem aplikasi E-Planning. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat memperlambat proses implementasi E-Government itu sendiri. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana implementasi e-planning. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih</p>

				kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.
5.	Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari, dan Muhammad Rasuli	2018	Analisi Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)	<p>Penerapan e-planning dan e-budgeting di Kabupaten Bengkalis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik SDM yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun SDM yang mau untuk konsen di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN).</li> <li>2) Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan e-planning dan e-budgeting hanya bisa di akses di tempat tertentu saja yaitu Bappeda dan BPKAD.</li> <li>3) Belum adanya regulasi yang jelas dalam hal ini revisi Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terkait dengan urusan dan kode rekening kegiatan yang ada dalam SIPKD dan Peraturan Bupati yang mengatur penerapan e-planning dan e-budgeting di Pemerintah Kabupaten Bengkalis.</li> <li>4) Aplikasi SIPKD yang masih memiliki kekurangan terkait fitur ataupun program yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terlibat dalam e-</li> </ol>

				<p>planning dan e-budgeting. Dalam penelitian fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana implementasi e-planning dan e-budgeting. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti hanya satu yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
6.	Harry Patrick Paat, Edward Fredrik Tuju, dan Meily Y.B Kalalo	2018	<p>IPTEKS Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Utara</p>	<p>BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan tahap penginstalan aplikasi, penginputan RPJMD, Analisis Satuan Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH), dalam aplikasi e-planning. Dengan demikian BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sudah mengimplementasikan e-planning dan proses selanjutnya BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penyusunan RKPD. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada pelatihan IPTEKS agar dapat mengoperasikan e-planning. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
7.	Muhammad Habibi	2018	<p>Evaluasi Implementasi sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi sistem e-planning di Bappeda Kutim yang diukur dengan Metode PeGI, Bappeda Kutim secara keseluruhan berada pada nilai 2,5 Secara umum</p>

			Menggunakan Pendekatan PeGi	implementasi sistem e-planning di Bappeda Kutim dikategorikan baik, namun nilai 2,5 tersebut merupakan nilai terendah untuk dikategorikan baik sehingga secara keseluruhan penilaian di Bappeda Kutim cenderung dalam kategori kurang sehingga banyak upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan dan peningkatannya. Fokus Penelitian ini adalah Evaluasi dari kinerja BAPPEDA kutim. Dan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.
8.	Lubna Salsabila	2018	Estabilishing And Implementing Good Practices E-Government	Dalam penelitian ini menggambarkan tentang status penerapan e-government antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai tolak ukurnya. Pun juga membahas faktor faktor kegagalan dan keberhasilan pembentukan <i>e-government</i> . Penelitian ini berfokus pada perbandingan <i>e-government</i> antara Indonesia dengan Korea Selatan dan faktor faktor yang menyebabkan kegagalan maupun keberhasilan penerapan <i>e-government</i> . Yang membedakan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.

9.	Erlina Sih Rahayu, Mulyono	2018	Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Terhadap User Performance Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderating Pada Karyawan PD BPR BKK Karanganyar	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer berpengaruh signifikan terhadap <i>user performance</i> . Semakin baik persepsi karyawan terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer maka kinerja pengguna sistem akan semakin baik. <i>Locus of control</i> terbukti sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer terhadap user performance pada karyawan PD BPR BKK Karanganyar. Fokus penelitian ini adalah peningkatan kinerja menggunakan metode LOC yang Yang membedakan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.
10.	Egis Tektona Grandis	2017	Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar	Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program e-planning di kota Banjar sebagian besar ketercapaian sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan seperti kurangnya kemampuan pegawai dalam menerapkan sistem e-planning. Yang mengakibatkan kurang terintegrasinya e-planning sebagai lanjutan dari SIMDA. Adapun upaya untuk penanganannya ialah melakukan

				<p>sosialisasi dan pelatihan guna untuk memberi pemahaman terhadap program e-planning. Fokus penelitian ini adalah keefektivitasan program e-planning. Yang membedakan dari penelitian yang diteliti adalah fokusnya lebih kepada faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
11.	Hutrianto, Ade Putra	2017	<p>Evaluasi Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Musrenbang Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa evaluasi kualitas sistem perencanaan pembangunan berbasis e-musrenbang di kabupaten Musi Secara keseluruhan item pertanyaan pada masing-masing variabel yang digunakan memiliki keterkaitan dan mempengaruhi secara langsung terhadap fasilitas dan fitur-fitur yang ada pada Sistem E-Musrenbang yang telah dikembangkan dan telah mendapatkan respon yang baik dari operator pengguna pada masing-masing dinas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin. Fokus pada penelitian ini yaitu evaluasi kualitas dari tiga variabel tersebut. Yang membedakan dari penelitian yang diteliti adalah fokusnya lebih kepada faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
12.	Ahmad Nazir	2017	<p>Implementasi Kebijakan E-Musrenbang di</p>	<p>Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: Karakteristik dari</p>



			<p>Kelurahan Gondong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang</p>	<p>masalah, Karakteristik kebijakan/undang-undang, dan karakteristik lingkungan, ketiga variable ini mampu membuktikan implementasi E-Musrenbang di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh berimbang antara yang senang dan yang kurang menyenangkan berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektronik dikarenakan efisiensi dan transparansi, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum menginginkan penggunaan musrenbang elektronik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan. Pada penelitian ini fokus penelitian di beratkan pada bagaimana implementasi kebijakan e-musrenbang. Sedangkan dari penelitian yang di teliti oleh peneliti menitik beratkan fokus pada faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang</p>
13.	Novy Setia Yunas	2017	<p>Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat</p>	<p>Sistem E-Musrenbang telah berhasil diterapkan di Surabaya dan menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E-Musrenbang di Kota</p>

				<p>Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan. Penelitian ini berfokus pada variabel paradigma masyarakat. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
14.	Nindia Prisca Putri	2015	<p>Studi Eksplorasi Tentang Variabel Pendukung Keberhasilan Aplikasi Sistem E-Musrenbang di Bappeko Surabaya</p>	<p>implementasi sistem e-musrenbang sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Walaupun, masih ada masalah tentang jaringan internet di kecamatan Gubeng. Keberhasilan suatu program didukung dari struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan tentunya dukungan sasaran kelompok dengan begitu implementasi sistem akan dapat terus berjalan dengan baik. Fokus penelitian ini menjurus pada tingkat keberhasilan sistem e-musrenbang perpektif banishing bureaucracy. Yang membedakan dari penelitian yang diteliti adalah fokusnya lebih kepada faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
15.	Syahrirsyah	2015	<p>Analisis Penerapan Sistem Informasi E-Musrenbang</p>	<p>Di dalam penelitian ini menggunakan model <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM). Pada model ini menjelaskan bahwa pengguna sistem cenderung mau</p>

			<p>Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo</p>	<p>menggunakannya jika sistem tersebut mudah digunakan dan bermanfaat. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis kesuksesan penerapan sistem informasi E-Musrenbang yang diterapkan di Kota Palopo dengan menganalisis tingkat penerimaan pemakai. Penelitian ini berfokus pada perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan yang membedakan fokus penelitian yang di teliti oleh peneliti yaitu fokusnya lebih kepada variabel faktor yang mempengaruhi implementasi e-musrenbang.</p>
--	--	--	---	---

Berdasarkan beberapa penelitian di atas ada ditemukan beberapa kecocokan dan dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian studi terdahulu ialah implementasi dari sistem informasi manajemen (*e-government*) serta dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang mana peneliti melakukan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan peneliti mengkaji faktor faktor apa saja yang mempengaruhinya. Serta, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penelitian model George Edward III sebagai landasan untuk menganalisis implementasi e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

## F. Kerangka Teori

## 1. E-Government

Peran pemerintah dalam pelayanan kepada publik era modern sekarang telah mengalami peningkatan. Hal tersebut, disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba efektif dan efisien. Pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi pada tiap instansi pemerintahan dikenal dengan istilah *E-Government*.

Menurut Dr. Nag Yeon Lee (Rubiyanto:2018) terdapat 8 model *E-Government*, yaitu:

- a.) Pemerintah ke masyarakat (G2C): penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
- b.) Masyarakat ke pemerintah (C2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
- c.) Pemerintah ke bisnis (G2B): transaksi- transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Sebagai contoh yaitu sistem *e-procurement*.
- d.) Bisnis ke pemerintah (B2G): mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien, terjadi peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem *e-procurement* adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.

- e.) Pemerintah ke pegawai (G2E): terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan.
- f.) Pemerintah ke pemerintah (G2G): memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.
- g.) Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N): pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial.
- h.) Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.

Kemudian menurut Raharjo (2001) manfaat dari penerapan *e-Government* adalah:

- a.) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah
- b.) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

- c.) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya.
- d.) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan *video conferencing*. Bagi Indonesia yang sangat luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.

Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. (Rubiyanto:2018)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis web atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya *E-Government* disatu sisi pemerintah

memberikan pelayanan publik yang baik guna dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

## 2. E-Musrenbang (*E-Planning*)

E-musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. E-Musrenbang juga dapat diartikan sebagai pengembangan dari Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dengan dikembangkannya E-Musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan; serta mendorong penerapan prinsip-prinsip *governance* (partisipatif, transparan, efektif dan efisiensi, serta akuntabel) dalam pemberian pelayanan publik dari Kementerian PPN/Bappenas. Pengembangan E-Musrenbang di koordinasikan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dengan melibatkan (PUSDATINRENBANG), Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Direktorat Alokasi Pendanaan

Pembangunan, dan direktorat-direktorat lain di Kedepatian Bidang Pengembangan Regional&Otonomi Daerah.

### 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi *E-Planning* (*E-Government*)

*E-planning* adalah salah satu bentuk dari *E-government*. Implementasi *E-Government* (M.Hamad Hasan & Jongsu Lee:2019) dipengaruhi berbagai macam faktor, yaitu :

#### 1.) Leadership

Dalam faktor leadership terbagi menjadi dua :

##### a.) *Role and Support* (Peran dan Dukungan)

Peran dan dukungan kepemimpinan dari pemerintah sangat penting agar penerapan e-musrenbang dapat terlaksana dengan maksimal sebagai bentuk e-government.

##### b.) Strategi Kepemimpinan

Strategi kepemimpinan juga sangat penting untuk promosi kebijakan e-government. Strategi yang diadopsi harus bijak dan sesuai dengan keadaan.

#### 2.) Regulasi

Dalam implementasi e-musrenbang sebagai bentuk *e-government* regulasi berpengaruh sebagai pengatur serta berguna sebagai



pedoman *e-government*. Regulasi dalam *e-government* terbagi menjadi dua :

a.) Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan sektor TIK agar penerapan *e-government* dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakannya.

b.) Dasar Hukum

Dasar Hukum pada Negara-negara berkembang membutuhkan hukum yang tepat untuk memberikan undang-undang yang diperlukan untuk pengembangan dan adopsi *e-Government* di sektor publik.

3.) Manajemen

Faktor manajemen dari implementasi *e-musrenbang* dipengaruhi oleh manajerial-sentris yang secara luas diklasifikasikan menjadi faktor manajerial dan ruang lingkup

a.) Strategi Manajerial

Kebijakan dan strategi TIK nasional hanya menyediakan pedoman di tingkat makro. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengembangkan strategi manajerialnya sendiri untuk mengakomodasi perubahan manajemen yang dibawa oleh teknologi. Ini bisa berupa perubahan kebijakan, proses atau budaya

#### b.) Kolaborasi

Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan merangsang pemupukan ide, solusi, dan pengetahuan. Selanjutnya, ini membantu organisasi untuk berbagi kebijakan, keahlian, dan infrastruktur mereka. Oleh karena itu, ini adalah kunci untuk promosi *e-Government* di sektor publik

#### c.) Struktur Organisasi

Struktur organisasi mempengaruhi tingkat partisipasi serta proses pengambilan keputusan implementasi *e-Government* dalam organisasi. Kemungkinan kebijakan tidak terlaksana karena lemahnya struktur organisasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai proseduk kerja atau ukuran dasar kerja dapat menanggulangi keadaan keadaaan umum pada suatu organisasi.

#### 4.) Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam implementasi *e-Government* (e-musrenbang) dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti di bawah ini:

##### a.) Fasilitas

Dalam penerapan *e-government* biasanya dibutuhkan pekerja profesional, membeli teknologi dan memasang infrastruktur

yang mana dari semua itu memerlukan dana yang besar. Efisiensi kualitas layanan tergantung pada teknologi dasar yang digunakan pada portal dan kualitas jaringan layanan telekomunikasi. Dengan demikian, perlu bagi lembaga-lembaga *e-Government* untuk terlebih dahulu mengevaluasi kedua hal tersebut. Dari hal di atas berarti faktor fasilitas juga mempengaruhi implementasi *e-government*.

b.) Kualitas SDM

Peran keahlian tidak hanya terbatas pada fase pengembangan *e-Government*, tetapi juga diperlukan sepanjang siklus hidupnya. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek *e-Government* membutuhkan para profesional yang berkualifikasi, terampil dan berpengalaman. Oleh karena itu, pelatihan sangat penting untuk memfasilitasi pengguna akhir dalam memahami dan menggunakan layanan. Untuk pemerintah, dapat mendorong adopsi layanan *e-Government* di sektor publik. Bagi warga negara, ini dapat memfasilitasi difusi layanan *e-Government* di masyarakat

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan kebijakan yang penting melihat fenomena berbagai kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintahan memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika

implementasikan oleh implementor yang berbeda. Melihat pentingnya suatu implementasi agar dapat berhasil maka perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, meninterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Zulkarnain Ramdhan Hasan:2019)

Menurut Udoji implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini

mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan. (Mulyadi:2015)

Berdasarkan pernyataan ahli di atas mengenai implementasi kebijakan dapat peneliti simpulkan bahwa setelah ditetapkan menjadi produk hukum berupa undang-undang selanjutnya dilakukan penyelenggaraan berupa pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur dan birokrat pada lembaga pemerintahan pusat dan daerah, menjalankan prosedur hukum sesuai dengan kebijakan yang dibuat dengan cara-cara berupa program-program implementasi yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah tujuan dan dampak yang diupayakan kebijakan tersebut.

Menurut George Edward III (Ahmad Nazir:2017) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :

a.) Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (a) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (b) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (c) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

b.) Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c.) Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi yakni :

1.) Pengangkatan Birokrasi

Dalam hal pengangkatan birokrat lembaga atau organisasi harus dapat memilih pelaksana kebijakan yang memiliki sebuah dedikasi, tanggung jawab, dan berkompeten dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.) Insentif

Pada dasarnya sebuah teknik memanipulasi sikap pelaksana kebijakan agar mereka semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya

d.) Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (a) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa?”; (b) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (c) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (d) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai ke- pentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (e) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebi- jakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni



birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut Edwards III ada 2 karakteristik utama, yakni :

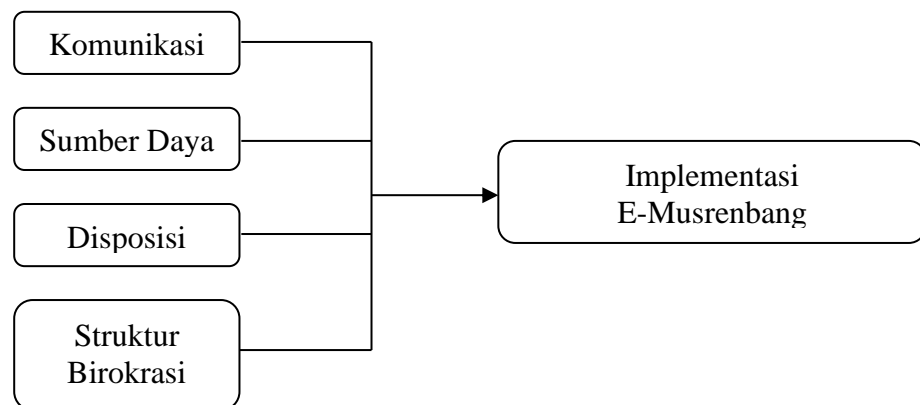
1.) *Standard operating system (SOP)*

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas

2.) Fragmentasi

Merupakan pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi.

**Kerangka Teoritik**



**G. Definisi Konseptual**

### 1. E-Government

*E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis web atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

### 2. Implementasi E-Musrenbang

Implementasi E-musrenbang adalah pelaksanaan suatu kebijakan dari bentuk *e-government*.

### 3. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu penyampaian pesan, ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain

### 4. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh suatu unsur yang berguna sebagai penunjang suatu kebijakan

### 5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas masing-masing operasi secara rutin dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dari definisi operasional, maka peneliti akan dapat mengetahui variabel yang akan diteliti. (Miriam Budiarjo 2015:18)

No.	Variabel	Indikator
1.	Komunikasi	a. Transmisi (Penyaluran) b. Kejelasan c. Konsisten
2.	Sumber Daya	a. Fasilitas yang memadai b. Kualitas SDM
3.	Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
4.	Struktur Birokrasi	a. Standard Operasional Prosedur (SOP) b. Fragmentasi

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah Objek data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari hasil naskah dan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi sehingga bisa menjadi tujuan dari penelitian kualitatif yang bisa mengambil gambaran realita yang empirik di balik fenomena secara mendalam dan rinci (Sugiyono 2017:9).

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karna berkaitan dengan pokok penelitian yaitu mendeskripsikan implementasi e-musrenbang di Provinsi Yogyakarta berdasarkan data yang diperoleh dari pihak yang terkait (BAPPEDA DIY)

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dilakukan penelitian dalam mendapatkan data-data akurat. Selain itu dalam menentukan tempat untuk melakukan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan e-musrenbang. Lokasi penelitian ini yaitu kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan terkait dengan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis akan menyusun unit analisa pada pihak instansi terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## 4. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang mengenai suatu informasi maupun hal-hal yang bersangkutan dengan konsep dari penelitian yang diperlukan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nasumber tersebut, kemudian di olah lagi oleh peneliti.
- b. Data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian seperti, jurnal,

artikel, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Pemerintah dalam negeri.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif, data yang didapatkan dalam bermacam teknik pengumpulan data, di olah agar menjadi suatu data yang valid. Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti, seperti :

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi dua arah antara pewawancara dengan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan suatu informasi ataupun data. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Yogyakarta dengan menggunakan teknik snowball atau chain sampling. Menurut Patton (2002) teknik pemilihan narasumber snowball atau chain sampling adalah teknik pemilihan narasumber kedua berdasarkan rekomendasi dari narasumber pertama, dan begitu juga selanjutnya hingga data yang dibutuhkan telah sudah cukup.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dan juga wawancara dan observasi tidak bisa dipertanggung jawabkan jika tidak ada bukti foto atau video yang menyatakan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo 12. Alasan peneliti menggunakan aplikasi NVivo adalah untuk menghemat waktu dari penelitian kualitatif yang menguras banyak tenaga karena banyaknya data yang dihasilkan, akan tetapi dalam menggunakan aplikasi ini peneliti harus sangat teliti serta menguasai sistem (*tools*) karena penggunaannya yang rumit. Dalam model ini ada 3 komponen tahapan, yaitu :

### a.) Import Data

Langkah dasar untuk mengelola data yaitu pertama – tama peneliti mengimpor data – data yang diperlukan. Data data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi

### b.) Ncapture

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan fitur Ncapture untuk menganalisis berita – berita terkait dengan implementasi e-musrenbang

c.) Koding

Selanjutnya, Koding merupakan langkah awal dalam pengoperasionalisasi analisis data kualitatif dari data data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti mengkoding data sesuai dengan variabel dan indikator – indikatornya

d.) Memperoleh Hasil Analisis

Dari hasil analisis dari NVivo 12 yang menggunakan fitur clustered analysis, peneliti mampu mendeskripsikan hasil dari analisis yang berupa pola tersebut.